TERBIT SEJAK 6 NOVEMBER 1945





Harga Eceran **Rp. 4000,-** (Dalam Kota) Luar Kota + Ongkos Kirim Berlangganan Hub. (061) - 7330737 Terbit 12 Halaman | Tahun LXXVIII No.113

Jokowi Teken UU Desa



Peringati Hardiknas

22 Pengunjukrasa Diamankan

Makasar, MIMBAR - Polisi membubarkan aksi unjuk rasa mahasiswa yang memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di depan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin dan Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan mahasiswa ditangkap polisi di dua lokasi.

Aksi Hardiknas yang digelar di sepanjang Jalan Sultan Alauddin yang merupakan jalur Trans Sulawesi menghubungkan Makassar dengan Kabupaten Gowa, ditutup massa aksi dengan membakar ban bekas sehingga arus

lalu lintas pun macet.

"Ada dua titik pertama di Alauddin, kedua di depan Unismuh tadi sudah diperingatkan agar tertib tapi ternyata tidak mengindahkan malah tetap

■ Bersambung ke Hal 11

Kepala Desa Dapat Uang Pensiun



Medan, MIMBAR - Kepala desa (Kades) bakal mendapatkan uang pensiun berdasarkan aturan baru Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (UU Desa) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Uang pensiun menjadi satu dari tiga hak keuangan kepala desa. Namun, UU Desa belum mengatur besaran tunjangan purnatugas. Nilai duit pensiun untuk kepala

desa diatur kemudian lewat peraturan pemerintah. "Mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa

■ Bersambung ke Hal 11

Polisi Cokok Pembunuh Wanita Dalam Koper

Palembang, MIMBAR - Polisi menyebut AARN tersangka pembunuhan terhadap wanita inisial RM, ditangkap di rumah keluarga istrinya di Palembang, Sumatera Selatan.

(Penangkapan) di rumahnya keluarga istrinya," kata Kapolsek Cikarang Barat Kompol Gurnald Patiran saat dikonfirmasi, Kamis (2/5).

Gurnald berkata penangkapan itu turut disaksikan oleh istri tersangka. Istrinya disebut kaget saat melihat AARN ditangkap pihak berwajib.

■ Bersambung ke Hal 11

: 19:44 WIB

■ Untuk kota Medan sekitarnya







: 12:25 WIB

: 15:44 WIB

Ashar

Pendidikan Kita Gagal

Oleh Dr A Rasyid, MA

KAMIS, 2 Mei 2024, ditandai sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sekolah dan kampus turut serta memeriahkan dengan upacara di lapangan terbuka. Mendikbudristek menyiapkan konsep pidatonya yang bisa liakses bagi siapa saja. Pidato Mendikbudristek dinilai cukup menggembira-

kan bagi perkembangan dunia pendidikan dengan narasi yang menekankan tentang Merdeka Belajar.

■ Bersambung ke Hal 11



Jakarta, MIMBAR - Perwakilan Komisi Pemilihan Umun (KPU) akhirnya hadir di sidang usai sempat kena semprot Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat karena absen di sejumlah perkara sengketa pileg. KPU hadir pasca sidang maraton sengketa pileg di jeda istirahat sekitar pukul 12.00 WIB. Perwakilan KPU dihadiri komisioner Idham Kholik.

"Oh, ini KPU udah hadir ya. Iya tadi

RASA ketidakadilan

pagi kita tarik itu. Sekarang sudah viral itu ya, kalau KPU saya marahi itu. Tolong untuk bisa diprioritaskan untuk hadir di sini,"

ucap Arief merespons kehadiran KPU. Arief menjelaskan kehadiran KPU dalam sidang penting untuk jalannya sidang. Jika tak bisa dihadiri KPU pusat, kehadiran bisa diwakili oleh KPU tingkat provinsi atau kabupaten kota.

"Mulai besok yang

■ Bersambung ke Hal 11

PDIP: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Bila PTUN Kabulkan Gugatan

Jakarta, MIMBAR - PDIP masih mengajukan gugatan terhadap KPU ke PTUN Jakarta, karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum meloloskan Gibran menjadi cawapres pada Pilpres 2024.

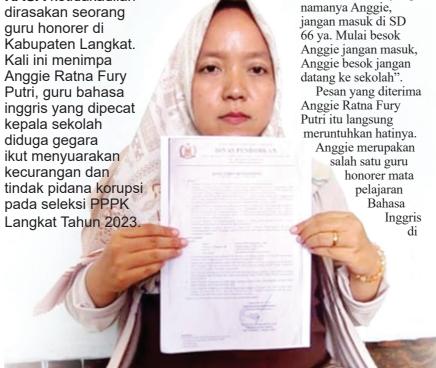
Sidang perdana dengan agenda persiapan pemeriksaan administrasi pun, digelar tertutup, Kamis (2/5)

Bersambung ke Hal 11



Nestapa Guru Honorer di Kabupaten Langkat

Dipecat Sepihak Usai Bongkar Korupsi Sekolah



SD 050666 Lubuk Dalam, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut). Anggie dipecat sepihak oleh kepala sekolah berinisial T.

"Pemecatan terhadap saya disampaikan kepala sekolah saat rapat dan di hadapan puluhan guru SD 050666 lainya," kata Anggie, Kamis (2/5).

Dalam rapat tersebut, kata Anggie, kepala sekolah menyampaikan agar ia tidak usah lagi masuk mengajar.

"Jadi mulai besok yang namanya Anggie, Nurul jangan masuk di SD 66 ya. Mulai besok Anggie jangan Masuk,

■ Bersambung ke Hal 11

Paloh Sungkan Minta Kursi Menteri

Jakarta, MIMBAR - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaku sungkan untuk meminta kursi menteri kepada presiden terpilih Prabowo Subianto di kabinet pemerintahan mendatang. Ia mengatakan belum membahas soal kursi menteri dengan Prabowo.

■ Bersambung ke Hal 11





■ Hehehe..



SAMBUNGAN

Polisi Cokok...

Dari Halaman 1

"Ya, pasti kaget, lah," ucap Gurnald.

Sebelumnya, jasad wanita asal Bandung berinisial RM (50) ditemukan di dalam sebuah koper di wilayah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat pada Kamis (25/4).

Dalam kasus ini, polisi lantas menangkap seorang pria berinisial AARN di Palembang, Sumatera Selatan. Kini AARN telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 338 KUHP serta Pasal 365 KUHP.

Polisi mengungkapkan tersangka dan korban sempat terekam kamera CCTV di sebuah hotel di Bandung.

KPU Hadir...

Dari Halaman 1

Sebab, lanjut Arief, tim kuasa hukum kadang tidak bisa menjawab. Menurut dia, kehadiran KPU penting untuk dimintai konfirmasi terkait perkara gugatan.

"Karena kuasa hukum kalau kita tanya, juga belum anu, belum siap betul belum tahu persis. Jadi kadang-kadang kita bertiga meminta konfirmasi KPU atau Bawaslu pada awal. Meskipun nanti secara lengkap termohon akan bisa memberikan penjelasan yang lengkap," katanya.

Amarah Arief sebelumnya sempat meledak pagi

Dalam rekaman CCTV tersebut, tersangka menggunakan kemeja hitam dan korban memakai baju merah lengkap dengan kerudung berwarna abu-abu masuk ke kamar hotel sekitar pukul 09.51 WIB.

Tersangka kemudian baru keluar dari kamar hotel sekitar pukul 18.39 WIB, sembari membawa koper berwarna hitam yang telah berisikan mayat korban.

Polisi juga mengungkapkan tersangka sempat menyetubuhi korban sebelum menghabisi nyawanya. Tak hanya itu, tersangka juga mengambil uang milik kantor yang saat itu dibawa korban.

sebelumnya saat memimpin sidang perkara 246 dengan pihak pemohon DPP PAN. Dia marah karena pihak prinsipal dari KPU tak ada

tiga tersebut. Arief menyebut KPU terlihat tak serius menghadapi sidang gugatan MK,

satupun yang hadir dalam sidang yang digelar di panel

bahkan sejak sengketa pilpres sebelumnya. "Ini KPU enggak serius gini gimana sih? Tolong disampaikan KPU harus serius. Jadi sejak pilpres kemarin KPU enggak serius itu menanggapi persoalan-persoalan ini," kata Arief.

Israel Bersiap Serang Hizbullah

Medan, MIMBAR -

Kepala Staf Umum Israel Herzi Halevi mengumumkan persiapan serangan di front utara di tengah penyerangan yang terus dilakukan gerakan Syiah Lebanon, Hizbullah, kata angkatan bersenjata Israel (IDF) pada Rabu (1/5).

"Anda (perwira komandan) melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam pertahanan operasional di utara, dan kami sedang mempersiapkan serangan di utara," kata Halevi seperti dikutip dari pernyat-



Halevi menyatakan, setelah menghadapi peristiwa sulit yaitu serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, saat ini pihaknya telah pulih dan bergerak maju dengan kuat, serta akan membuat pernyataan yang sangat jelas tentang kehadiran IDF di front utara ke depannya. Ia juga menyatakan bahwa pasukan cadangan angkatan bersenjata IDF

juga memainkan peran penting dalam hal ini.

Hizbullah telah melancarkan serangan udara terhadap Israel sejak Oktober 2023, ketika situasi di wilayah tersebut semakin memburuk setelah Israel mengumumkan operasi militer terhadap gerakan Palestina Hamas di Jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri

Lebanon mengatakan sekitar 100 ribu orang terpaksa meninggalkan rumah mereka di Lebanon selatan karena penembakan yang dilakukan militer Israel.

Israel juga mengatakan bahwa sekitar 80 ribu penduduk Israel utara mengalami situasi serupa. Pada 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan roket skala besar terhadap Israel dan melanggar perbatasan, menyerang lingkungan sipil dan pangkalan militer. Hampir 1.200 orang di Israel tewas dan sekitar 240 lainnya diculik dalam serangan itu.

Israel melancarkan serangan balasan, memerintahkan blokade total terhadap Gaza, dan memulai serangan darat ke daerah itu untuk memusnahkan pejuang Hamas dan menyelamatkan para sandera. Lebih dari 34.400 warga telah terbunuh sejauh ini akibat serangan Israel di Jalur Gaza, menurut otoritas setempat. (rep/js)

22 Pengunjukrasa...

Dari Halaman 1

menutup jalan penuh, bakar ban, dan melempar batu inilah kami melakukan penertiban," kata Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Mokhamad Ngajib, Kamis (2/5).

Dari penindakan tersebut, kata Ngajib, puluhan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hardiknas di Makassar ditangkap polisi.

"Ada beberapa yang kita amankan dari

Unismuh ada 22 dan Alauddin sementara masih kita datakan," katanya.

Sementara itu mahasiswa yang mengikuti aksi tersebut telah membubarkan diri.

Pada saat petugas menyisir di dalam kampus Unismuh Makassar, petugas menemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis badik

"Tindak lanjut kita akan melakukan

pemeriksaan kalau memenuhi unsur tindak pidana kita lakukan tindakan tegas. Kita tes urine semuanya juga," katanya.

Ngajib memastikan situasi Kota Makassar pasca pembubaran aksi unjuk rasa mahasiswa memperingati Hardiknas berjalan aman dan

'Semua aman kondusif, ini sudah melanggar dan meresahkan warga lainnya. Yang lain sudah tidak ada," katanya. (cnni/js)

Paloh Sungkan...

"Ya, kan, ada perasaan sungkan-sungkan juga kan, kata Paloh saat ditanya soal permintaan kursi menteri untuk NasDem, di Jakarta, Kamis (2/5).

Menurut Paloh, urusan kursi menteri kewenangan penuh Prabowo bersama wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

"Kita belum tahu, memang yang punya otoritas

Dari Halaman 1 untuk itu kan kalian tahu," ucap dia.

Pada Selasa (25/4), Paloh telah mendeklarasikan dukungan NasDem untuk pemerintahan Prabowo-Gibran. Paloh menyebut sikap untuk bergabung merupakan keputusan yang dipikirkan matang-matang.Adapun di Pilpres 2024, NasDem bersama PKB dan PKS mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).(cnni/js)



Pendidikan Kita...

Dari Halaman 1

Mendikbudristek mengakui wajah baru pendidikan dan kebudayaan Indonesia sedang dibangun bersama dengan gerakan Merdeka

Belajar. Mendikbudristek sudah mendengar lagi anak-anak Indonesia berani bermimpi karena mereka merasa merdeka saat belajar di kelas. Mendikbudristek sudah melihat lagi guru-guru yang berani mencoba hal-hal baru karena mereka mendapatkan kepercayaan untuk mengenal

dan menilai murid-muridnya. Mendikbudristek sudah menyaksikan lagi para mahasiswa yang siap berkarya dan berkontribusi karena ruang untuk belajar tidak lagi terbatas di dalam kampus. Dan kita sudah merayakan lagi semarak karya-karya yang kreatif karena seniman dan pelaku budaya terus didukung untuk berekspresi. Lima tahun bukan waktu yang sebentar untuk menjalankan tugas memimpin gerakan Merdeka Belajar. Namun, lima tahun juga bukan waktu yang lama untuk membuat perubahan yang menyeluruh.

Orldtop20.org merilis bahwa peringkat pendidikan Indonesia pada 2023 berada diurutan ke 67 dari 203 negara di dunia. Urutan Indonesia berdampingan dengan Albania di posisi ke-66 dan Serbia di peringkat ke-68. Worldtop20. org merupakan situs yang kerap membagikan peringkat pendidikan dari berbagai negara. Salah satu programnya adalah World Top 20 Education Poll. Melansir situs worldtop20.org, World Top 20 Education Poll rutin melakukan survei terkait peringkat 20 sistem pendidikan terbaik di dunia dari 203 negara. Worldtop20.org mengumpulkan data statistik yang dikumpulkan berasal dari 6 organisasi interna-

sional. Organisasi itu adalah OECD, PISA, UNESOC, EIU, TIMSS, PIRLS. Polling ini diadakan oleh organisasi nirlaba di bidang pendidikan,

yakni New Jersey Minority

Educational Development

(NJ MED). Fakta yang dirilis tersebut di atas tentu saja sangat menyedihkan melihat kondisi pendidikan kita di tanah air. Karena itu tidak ada kata lain, kita harus bekerja keras untuk meraih peringkat tertinggi. Tidak lagi sekedar bernerasi, tetapi harus melakukan dengan kerja konkrit, serta menyiapkan anggaran

pendidikan yang selayaknya. Islam lahir tentu saja membawa revolusi pendidikan. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang pertama turun, menurut mayoritas ulama, adalah surat al-'Alaq. Isinya mengandung perintah untuk belajar. Berdasar ayat tersebut, Rasulullah Saw mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu: Artinya: Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah.

Rasulullah juga memberikan bimbingan kepada umatnya agar sukses, baik di dunia maupun di akhirat, dengan memperkaya ilmu pengetahuan, sebagaimana diungkap dalam sabdanya: Artinya: Siapa ingin (bahagia di) dunia harus berilmu, siapa ingin bahagia di akhirat harus berilmu, dan siapa ingin bahagia dunia dan akhirat harus berilmu.

Langkah awal perjuangan Rasulullah adalah memberantas buta huruf secara besarbesaran, karena beliau tahu benarbahwa agama tidak akan tumbuh bila umatnya bodoh. Rasulullah berhasil mengubah masyarakat Arab yang semula bodoh (jahiliyah) menjadi masyarakat yang berilmu. Islam pun cepat menyebar ke pelbagi pelosok dunia, dan mewariskan berbagai budaya yang sangat tinggi dan berguna bagi umat manusia. (*)

Dari Halaman 1

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah," bunyi pasal 26 ayat (3) huruf d UU Desa.

Bagian penjelasan pasal itu menyebut tunjangan purnatugas sebagai penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi kepala desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya. Tunjangan diberikan dalam bentuk uang atau yang setara dengan itu.

Tunjangan purnatugas tak hanya diberikan kepada kepala desa. Uang itu diberikan kepada perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Selain uang pensiun, kepala desa juga berhak atas penghasilan bulanan, tunjangan, hingga penerimaannya lainnya yang sah. UU Desa juga menjamin tunjangan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan untuk kepala

Aturan lain yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah masa jabatan kepala desa. Masa jabatan kades ditamah dari semula enam tahun menjadi delapan tahun.

Meski begitu, jumlah periode masa jabatan kades dikurangi dari tiga periode menjadi dua periode. Dengan demikian, total masa jabatan seorang kepala desa bisa mencapai 16 tahun.

Jokowi Teken...

MASA JABATAN KADES

Sementara, Pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyepakati revisi UU tentang Desa atau RUU Desa dibawa pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-undang. Keputusan tersebut diketok setelah Baleg

DPR dan perwakilan pemerintah melalui Mendagri Tito Karnavian menggelar rapat kerja persetujuan tingkat I revisi UU Desa digelar di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (5/2) malam.

"Iya, Baleg Raker bersama pemerintah menyetujui pembahasan persetujuan tingkat I RUU tentang Desa. Salah satu poin krusial masa jabatan kades delapan tahun dua periode. Saya mimpin rapat di Baleg dan diputus diterima semuanya," ujar Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis (2/5).

Salah satu poin krusial yang disepakati oleh Baleg DPR dan Pemerintah yakni terkait masa iabatan Kenala Desa menjadi delapan tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk dua kali

Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 39 terkait masa jabatan Kepala Desa dalam RUU

"Karena materinya banyak yang sama sehingga cepat pembahasannya. Kan hanya delapan poin yang pemerintah beda dengan DPR. Dan itu bisa dikompromikan dan jadi rumusan

Mengutip laman resmi DPR, Panja pembahasan RUU Desa, secara musyawarah mufakat memutuskan antara lain hal-hal sebagai

sudah bisa disahkan," lanjut Baidowi.

Pertama, penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi. Kemudian ketentuan Pasal 26, Pasal 50A, dan Pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan Kepala Desa, BPD, dan Perangkat Desa sesuai kemampuan keuangan Desa. Lalu, penyisipan Pasal 34A terkait syarat jumlah calon Kepala Desa dalam Pilkades; ketentuan Pasal 39 terkait masa jabatan Kepala Desa menjadi delapan tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk dua kali masa jabatan.

Kemudian ketentuan Pasal 72 terkait sumber pendapatan desa; ketentuan Pasal 118 terkait Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Pasal 121A terkait Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang.

Hasil Panja kemudian secara resmi disepakati oleh seluruh sembilan Fraksi di Pembahasan Tingkat I Baleg DPR. (cnni/js)

PDIP: MPR...

Dari Halaman 1

JADI DASAR

Ketua Tim Hukum PDIP, Prof Gayus Lumbuun, mengharapkan putusan PTUN nantinya menjadi dasar bagi MPR untuk tidak melantik presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran. Kata mantan hakim agung itu di PTUN, sebelum sidang digelar, "Dia (MPR) akan memikirkan apakah sebuah produk yang diawali dengan melanggar hukum itu, bisa dilaksanakan (dilantik).

Kami berpendapat, ya... bisa iya (dilantik), juga bisa tidak, karena, mungkin MPR tidak mau melantik, ini yang perlu di-quote."

Meski demikian, pihaknya tidak berharap PTUN mengabulkan seluruh permohonan yang

Namun, PTUN diharapkan menyatakan penyelenggara Negara, dalam hal ini KPU, telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena meloloskan Gibran.

Dari dasar itu, MPR pun diharapkan mempertimbangkan ulang untuk melantik presiden dan wakil presiden terpilih.

Ujar Gayus, "Tapi kalau di pertimbangan hakim (PTUN) menyebutkan memang (KPU) melanggar hukumnya penguasa, dengan kekuasaannya menerbitkan satu proses dengan hasil penetapan presiden dan calon wakil presiden

atau wakil presiden." "Kalau (sksi) rakyat menghendaki tidak melantik, karena memang didapati diawali oleh

perbuatan melanggar hukum penguasa, nah... itu sangat bisa mungkin terjadi. Jadi, bisa tidak dilantik," ia berharap.

SIPP PTUN

Sebelumnya diberitakan, berdasarkan informasi dari SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) PTUN Jakarta, sidang tersebut digelar pada pukul 10.00 wib. Gugatan teregister dengan nomor perkara 133/G/TF/2024/PTUN.JKT. PDIP mengajukan gugatan ke PTUN, Ja-

karta, pada Selasa (2/4). Gugatan ini diajukan karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024.

PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres sebagai tindkan perbuatan melawan hukum.

"Adapun perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan dalam gugatan ini adalah berkenaan dengan tindakan KPU sebagai penguasa di bidang penyelenggaraan pemilu karena telah

mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres, yaitu terhadap Saudara Gibran Rakabuming Raka," kata Gayus Lumbuun di Kantor PTUN, Cakung, Jakarta Timur. (kps/

Dipecat sepihak...

Dari Halaman 1

Anggie besok jangan datang ke sekolah," ucapnya menirukan kepala sekolah.

Sebagai penggantinya, kepala sekolah menyampaikan agar mata pelajaran Bahasa Inggris dihandle oleh guru kelas masing-masing. Bahkan, kepala sekolah juga menyatakan kepada guru-guru untuk melakukan musyawarah terkait mata pelajaran Bahasa Inggris.

"Bila perlu (diganti) Bahasa Jawa, gak usah bahasa Inggris," ujarnya.

Anggie sempat menanyakan kepada kepala sekolah apa kesalahan yang dibuatnya, sehingga harus dipecat. Namun, T mengatakan bahwa guru honorer perempuan itu tidak bersalah.

"Tetapi anehnya kepala sekolah tetap memecat saya," keluhnya.

Dampak pemecatan tersebut, Anggie mengaku sangat kecewa, menangis dan tidak lagi bisa mengabdikan diri sebagai guru untuk membantu mencerdaskan anak-anak di SD

LBH Medan yang merupakan kuasa hukum dari 107 orang guru honorer di Langkat, yang berjuang hari ini termasuk Anggie mengecam keras tindakan pemecatan yang dilakukan kepala sekolah.

DIKECAM LBH

Menurut Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, tindakan kepala sekolah adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan (abuse of power). Ia mengatakan, pemecatan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana amanat Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 2 ayat (3) dan (4) Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang perlindungan

"Yang menyatakan secara tegas jika Pendidik dan Tenaga Pendidik dilindungi dari tindakan kekerasan ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi dan perlakuan tidak adil," jelas Irvan.

Pendidik dan Tenaga Pendidik.

Ia berpandangan kalau tindakan pemecatan kepala sekolah telah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana yang telah diamanatkan UUD 1945 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28.

"LBH Medan menduga pemecatan terhadap Anggie telah direncanakan terlebih dahulu, hal tersebut dibuktikan dengan dilakukan pada saat rapat dan di hadapan puluhan guru. Kemudian sikap dan perkataan pemecatan yang disampaikan kepala sekolah dilakukan secara berulang-ulang yaitu terhitung lebih dari

4 kali," imbuhnya.

Pihaknya menduga pemecatan yang dilakukan kepala sekolah sebagai bentuk intimidasi dan pembungkaman terhadap para guru honorer yang secara lantang menyuarakan kecurangan dan tindak pidana korupsi pada seleksi PPPK Langkat Tahun 2023.

"Bahwa perlu diketahui terkait permasalahan PPPK Langkat, Polda Sumut telah menetapkan 2 orang kepala sekolah sebagai tersangka. Namun kedua kepala sekolah tersebut hingga sampai saat ini belum dilakukan penahanan," ungkapnya.

Oleh sebab itu, LBH Medan mendesak Pj Bupati Langkat menindak tegas T karena telah melakukan pemecatan terhadap Anggie dan mengembalikannya sebagai guru honorer di

SD 050666 Lubuk Dalam. "Pihak-Pihak terkait baik kepala sekolah, K3S atau lainya untuk tidak melakukan dan menghentikan intimidasi serta ancaman kepada guru-guru honorer Langkat yang saat ini menyuarakan haknya secara konstitusional,"

LBH Medan juga meminta Kapolda Sumut untuk segera menetapkan aktor intelektual atas kasus seleksi PPPK Langkat sebagai tersangka.

"Dan melakukan penahanan," pungkasnya.